

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Arief, Barda Nawawi., 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2011, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaruan dan Perbandingan Hukum Pidana)*, Pustaka Magister, Semarang.

Braithwaite, John & Heather Strang, 2000, *Restorative Justice: Philosophy To Practice*, Asghate Darmouth, Aldershot.

Chazawi, Adam 2007, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dignan, James, 2005, *Understanding Victims And Restorative Justice*, Open University Press, hlm.94.

Eddyono, Supriyadi Widodo, 2015, *Hukuman Mati dalam RKUHP: Jalan Tengah Yang Meragukan*, Institute Criminal Justice Reform, Jakarta.

Fajri, Em Zul dan Ratu Aprilia Senja, 2007, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Yogyakarta.

Hamel, G.A van, 1913, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*, Derde Druk, De Erven F.Bohn Haarlem & Gebr. Belinnfante's-Gravenhage.

Hatta, Mohammad., 2016, *Kapita Selekt Pembaharuan Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, Yogyakarta.

Hiariej, O.S Eddy, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Heniarti, Dini Dewi., 2017, *Sistem Peradilan di Indonesia (Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum, dan Pembaharuan Hukum Nasional)*, Refika Aditama, Bandung.

Lafave, Wayne R. 2010, *Principle of Criminal Law*, West A Thomson Reuters Business.

Loewy, H. Arnold, , 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Mannheim, Herman, 1946, *Criminal Justice and Social Reconstruction*, Oxford University Press, New York

Muhammad, Abdulkadir., 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.

Mulyadi, Lilik., 2020, *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Mulyana, Asep N., 2020, *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Remmelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Rosidah, Nikmah., 2013, *Hukum Peradilan Militer*, CV Anugrah Utama Rahardja, Bandar Lampung.

Salam, Moch. Faisal., 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Saleh, Roeslan, 1983, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta.

Sianturi, S.R, dan E.Y Kanter, 2012, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.

Suringa, Hazewinkel, 1953, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*, H.D. Tjeenk Wilink& Zoon N.V.-Haarlem.

Soehino., 1986, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono dan Siti Mamudji., 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono., 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Tift, Larry & Dennis Sullivan, 2006, *Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective*, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York.

Vos, H.B., 1950, *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, Derde Herziene Druk, H.D. Tjeenk Wilink& Zoon N.V.-Haarlem.

Zulfa, Eva Achjani, 2014, *Konsep Dasar Restorative Justice*, Kerjasama Fakultas Hukum Gadjah Mada dengan Masyarakat Hukum Pidana Dan Kriminologi, Yogyakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (*staatsblad* 1934, No.167) Dengan Keadaan Sekarang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591).

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120).

### **C. Skripsi, Tesis dan Disertasi**

Anugerah, Listakeri Syafriliana, 2018, “Eksistensi Pidana Mati Menurut Perspektif Masyarakat”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Hidayat, Rezqi, 2020, “Kebijakan Formulasi Mengenai Pidana Mati Bersyarat Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Justisia, Amalia Febri, 2021, “Penjatuan Pidana Pemecatan Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Malik, Rivaldy Syah, 2016, “Penjatuan Pidana Mati Terhadap Anggota TNI Inisial (MAI) Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung.

### **D. Website**

DISPENAD, 2012, “Sejarah TNI”, <http://www.tniad.mil.id/index.php/sample-page-2/sejarah/>.

Kemdikbud, 2016, “Induksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/induksi>.

Kemdikbud, 2016, “Deduksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/deduksi>.

## **E. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 14-K/PM II-08/AL/II/2005 perihal perkara Kopda Mar Suud Rusli dan Letda Mar Syam Ahmad Sanusi, 8 Februari 2005.

Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 05-K/PMT.III/AL/III/2006 perihal perkara Kolonel Laut (S) Muhammad Irfan Djumroni, 2 Maret 2006.

Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 63-K/PM.II-09/AD/III/2013 perihal perkara Prada Mart Azzanul Ikhwan, 24 April 2013.